

### Studi Matching Grant

Pada 1997, PPK hanya sebuah proyek percontohan yang dilakukan di 25 desa, namun kini menjadi program pembangunan partisipatif terbesar di dunia. Pada 2002, lokasi PPK mencakup lebih dari 20.000 desa, dan pada akhir 2003, saat fase kedua program ini digulirkan, cakupannya menjadi 28.000 desa di 29 propinsi atau 91 persen dari total propinsi di Indonesia.

Guna melihat sejauh mana pola tersebut berjalan dan apa dampaknya bagi pembangunan daerah, salah satu Konsultan Bank Dunia melakukan Studi *Matching Grant* (MG) pada Januari-Mei 2004, berdasarkan pelaksanaan PPK II tahun pertama. Dari studi itu diketahui adanya keinginan Pemda untuk mengikuti pola MG. Selain karena PPK merupakan program yang sangat baik, juga karena masih banyak daerah yang belum tersentuh PPK. Apalagi, dalam MG, biaya untuk pendampingan konsultan dibebaskan. Hasilnya, pada tahun pertama PPK II, 85 dari 192 kabupaten menerapkan pola MG dengan kontribusi APBD masing-masing antara Rp 500 juta sampai Rp 4 miliar atau 0,6-4,7 persen pengeluaran daerah. Penilaian aparat terhadap kinerja PPK dapat dilihat di Tabel 18.

**Tabel 18: Penilaian Aparat terhadap Kinerja PPK**

Tinggi		Rendah	
Aspek	Nilai (%)	Aspek	Nilai (%)
Transparansi/ rendah korupsi	86	Efisiensi waktu	18
Kapasitas Konsultan	84	Kemampuan	36
Efisiensi biaya	80	Implementasi target pertemuan	41
Laporan dan ketersediaan data	77	Kontribusi masyarakat	48
Kepuasan akan hasil	73		
Kepuasan masyarakat	65		
Meningkatkan kemampuan teknik	60		
Mengurangi kemiskinan	53		

Peneliti juga mencoba melihat kaitan MG dengan keberlanjutan fiskal, kontribusi Pemda, serta isu-isu prosedural seputar MG, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, melalui wawancara dengan sejumlah aparat, TK PPK Kabupaten, anggota DPRD Kabupaten dan konsultan di 17 kabupaten dari enam propinsi. Meski beberapa wilayah mengaku keterbatasan dana merupakan alasan tidak mengikuti MG, namun nampaknya kapasitas fiskal tidak mempengaruhi keputusan tersebut.

*"Konsep PPK dalam memberdayakan masyarakat sangat bagus. Mereka terlibat aktif dalam pembangunan, mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaannya."*

**Idris, Sekretaris TK PPK Sumenep**

Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan hal itu. Pertama, kenyataan bahwa MG tidak membutuhkan biaya tinggi karena tidak mempengaruhi pendanaan FG, sehingga MG nampaknya bukan suatu keharusan. Kedua, mengikuti MG hanya untuk menyenangkan pusat. Ini bisa menjelaskan kenapa alokasi dana untuk MG relatif kecil. Hal itu selanjutnya dapat menjelaskan kenapa kapasitas fiskal tidak mempengaruhi alokasi dana untuk MG. Alasan lainnya, karena mereka memiliki program alternatif lain yang disetujui pimpinan daerah dan DPRD, serta kenyataan adanya salah komunikasi diantara aparat.

*"Kalau kita memberi ikan, masyarakat akan manja, terus-teusan minta ikan. PPK memberi kail dan jala, sehingga masyarakat belajar mandiri dan memiliki kapasitas lebih tinggi."*

**(Wakil Bupati Kendari)**